

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Apeldoorn, L. J. Van. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, J. (2006). *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Chomzah, A. A. (2002). *Hukum Pertanahan Seri hukum Pertanahan I*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Effendy, B. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- Hadimulyo. (1997). *Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2019). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hermit, H. (2004). *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, tanah Negara dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hutagalung, A. S. (2000). *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, Suatu Kumpulan Karangan*. Depok: UI Press.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Loqman, L. (1995). *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Universitas Tarumanagara.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Murad, R. (1999). *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Parlindungan, A. P. (1999). *Pendaftaran Tanah Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, E. (1994). *401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Peraturan Pemerintah) Nomor 37. (1998). *Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24. (1997). *Tentang Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Radbruch, G. (1952). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Germany: Koehler Verlag Stuttgart.
- Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Komperhensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesanto, J. B. (1995). *Hukum Agraria I*. Semarang: UNDIP Press.
- Soetiknjo, I. (1994). *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriadi. (2007). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susila, I. G. (2014). *Kejahatan Sertifikat Tanah Ganda*. Semarang: Universitas Brawijaya Press.
- Sutedi, A. (2014). *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Syarief, E. (2014). *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 5. (1960). *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN.BDG. (2019). Perkara Gugatan. Bandung: Mahkamah Agung.

## C. Sumber Lain

Arifin, F. S. (2008). *Pembaruan Agraria Nasional (PAN) dengan Program Sertifikasi Tanah Melalui Prona Guna Menyukkseskan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Pemalang*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

BPN Kota Cimahi. (2024). About. Diambil 20 Juli 2024, dari <https://kot-cimahi.atrbpn.go.id/>

Dimas, R. (2021). Publikasi Pendaftaran Tanah di Negara Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Prosiding Seri Seminar Nasional*, 1(1).

Istijab, I. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1(1).

Itasari, E. R. (2019). Fulfillment of Education Rights in The Border Areas of Indonesia and Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.14>

Permana, I. G. A. D. S., & Sudarsana, I. K. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah. *Jurnal Harian Regional*, 2(5), 1–10.

Ridlwani, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachwachterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141–152.

Sahono, L. S. M. (2012). Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukumnya. *Perspektif*, 17(2), 90–97.

Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pendecta: Research Law Journal*, 7(1), 112–122. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2371>

Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2). <https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1015>

Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertipikat Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20), 76–82.